



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 11 Maret 2017

Halaman: 1

Konsep Relokasi

Belum Jelas

Program M3K Masih Sebatas Wacana

JOGIA - Relokasi disebut-sebut sebagai solusi paling taktis dalam menyikapi warga penghuni bantaran Sungai Code. Hanya, hingga kemarin (10/3) Pemkot Jogja belum memiliki data detail jumlah kepala keluarga (KK) di sepanjang bantaran Sungai Code yang menjadi sasaran rencana program *mundur, munggah, madhep kali* (M3K). Berikut area relokasi yang disiapkan. Termasuk warga terdampak bencana talud longsor di wilayah Terban, Gondokusuman. » Baca Konsep... Hal 7

Penetapan garis sempadan sungai minimal **3 meter** di kiri dan kanan tepi palung sungai.

Instansi	Nilai
1. Din. PUPK	☐ N
2. Din. PM dan Perizinan	☐ P
3.	☐ N
4.	☐ N
5.	☐ N

✓ Netral
✓ Segera
✓ Untuk diketahui

MENERAWANG: Seorang warga Terban sedang mengamati talud longsor yang mengancam puluhan KK di bantaran Sungai Code.

M3K Solusi Terbaik Penataan Kawasan Sungai Perkotaan

KONSEP...

Sambungan dari hal 1

Bahkan, Penjabat Wali Kota Jogja Sulistyio mengaku belum ada keputusan untuk merelokasi warga yang selama ini menghuni rumah di atas talud di bawah talud yang longsor pada Senin (6/3).

Kendati demikian, Sulistyio mengisyaratkan ada kemungkinan merelokasi warga terdampak longsor ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai solusi alternatif.

Sejauh ini pemkot mengambil sikap persuasif. Sulistyio telah menginstruksikan jajarannya untuk menanggul para pemilik bangunan di atas talud ambrol. "Kami akan ajak mereka bicara. Pembongkaran (bangunan) tentu harus rembugan dulu," ujarnya kemarin.

Terkait rencana perbaikan talud, Sulistyio menegaskan tidak boleh asal-asalan. Harus diperhitungkan kekuatannya, supaya tak mudah ambrol. Itu jika warga berkehendak memperbaiki talud secara swadaya. Sebab, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) menolak melaksanakannya. Karena sebagian besar bangunan di bantaran Sungai Code melanggar garis sempadan sungai (GSS), se-

perti diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

"Yang tahu orang teknik itu. Dan seharusnya di atas talud (memang) tidak boleh ada bangunan," ingat Sulistyio.

Sementara Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja Aki Lukman Nur Hakim meminta pemilik bangunan yang berada di atas talud RW 01 Terban untuk merobohkannya.

Perintah pembongkaran bangunan batako itu bertujuan agar tidak membebani talud yang sudah longsor. Sehingga tak membahayakan penghuni rumah di bawahnya.

"Bangunan itu bahaya karena sudah retak. Kalau kena gempa atau angin bisa roboh setiap saat," ujarnya.

Untuk sementara perintah pembongkaran belum menyentuh semua warga sasaran M3K. Hanya bagi warga terdampak dan pemilik bangunan yang terancam terkena dampak longsor susulan.

Kebijakan serupa juga bakal diterapkan bagi pemilik bangunan yang ada di bawah talud



Bangunan itu bahaya karena sudah retak. Kalau kena gempa atau angin bisa roboh setiap saat."

Aki Lukman Nur Hakim,
Kabid Sumber Daya Air, Dinas PUPKP Kota Jogja

maupun yang persis menempel di bibir sungai. Namun, langkah ini masih menunggu respons BBWSO, selaku lembaga yang berwenang. "Karena bangunan di lokasi itu juga melanggar garis sempadan sungai," ungkap Aki.

Dikatakan, belum melangkahnya pemkot dalam penanganan kawasan terdampak longsor bukan tanpa alasan. Untuk membersihkan material longsor pun masih diperhitungkan. Aki mengaku tak berani membersihkan material longsor karena khawatir justru akan menyebabkan area longsor makin parah. Meskipun material longsor membuat alur sungai mengecil dan mengancam talud lain yang bertebaran jika terjadi arus deras.

Pada bagian lain, mengenai legalitas bangunan di bantaran Sungai Code, Aki menengarai

banyak pelanggaran dilakukan warga. Dengan menambah ruang dan bangunan di belakang rumah, sehingga tak sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan.

Terkait persoalan tersebut, Kabid Pelayanan Dinas Perizinan Untuk bangunan yang di bawah talud, Kepala Bidang Pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Setono mengaku belum mengecek lokasi. "Jika memang ada bangunan tak bertizin ya harus diterbitkan. Itu kewenangan Satpol PP," katanya.

Terpisah, Lurah Terban Anif Luhur Kurniawan menjelaskan, tanah-tanah yang didiami warga saat ini, terutama yang terletak di bawah talud, dulunya merupakan bekas bong atau makam. "Sebagian warga mengakui jika tak memiliki bukti kepemilikan tanah. Karena memang bukan milik mereka," beber Anif.

Sementara itu, M3K yang terus didukung-dengungkan sebagai solusi penataan kawasan sungai perkotaan ternyata masih sebatas konsep. Belum ada tindak lanjut secara konkret. Termasuk dalam hal penganggarannya.

Progres program tersebut masih dalam tahap *pilot project* oleh Pemprov DIJ di wilayah Gema-wang. Rencananya, di kawasan itu akan dibangun rumah susun

untuk merelokasi warga bantaran sungai. Sementara pemerintah menyulap permukiman di kawasan sempadan sungai sesuai konsep M3K.

Ketua Forum Komunikasi Winongo Asti (FKWA) DIJ Endang Rohilani mengaku sudah sejak lama menyosialisasikan program M3K yang merupakan gagasan Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X. Ironisnya, saat masyarakat mulai mau mengikuti program tersebut, pemerintah tak membatenginya dengan kebijakan anggaran. "Ini masalah yang terjadi saat ini. Masyarakat sudah siap mundur, tapi anggarannya belum ada," ungkap Endang.

Diakui, M3K telah menjadi isu strategis penataan sungai di wilayah perkotaan. Menurut Endang, sebenarnya banyak pos anggaran yang bisa digunakan untuk merealisasikan M3K. Termasuk dana-dana dari pusat. Seperti halnya program Kota

Tanpa Kumuh (Kotaku). "Tapi saya tidak tahu kenapa fasilitator kelompok (faskel) belum bisa menyajikan konsep penataan yang kuat. Selama ini masih parsial," bebenya.

Dalam kesempatan itu Endang juga menyoroti kemungkinan merelokasi warga ke rusunawa. Dari pengalaman melakukan sosialisasi M3K, Endang memperoleh informasi bahwa masyarakat agak alergi dengan istilah rumah susun sewa. Meski konsepnya hampir sama dengan rusunawa, Endang berharap bisa menjadi hak milik. Menurutnya, hal itu lebih bisa menarik minat warga untuk relokasi.

Hal senada disampaikan penjabat Sungai Code Totok Pratopo. Rusunawa dinilainya menjadi solusi terbaik penataan warga penghuni kawasan sungai perkotaan. Namun, persoalan terkait alas hak masih menjadi kendala.

Totok berharap, kendala tersebut bisa diantisipasi dengan

akses pembiayaan oleh pemerintah. Mulai anguran sewa, subsidi uang muka, dan lainnya. Termasuk inovasi konsolidasi lahan. "Tinggal pemerintah mau tidak setiap tahun direpotkan dengan persoalan longsor dan banjir," ucapnya.

Karena itu, Totok mendorong pemkot lebih aktif berkomunikasi dengan warga. Dan menunjukkan data wilayah mana saja yang terancam bahaya longsor dan banjir.

Menurutnya, usai erupsi Gunung Merapi 2010, komunitas pemerhati sungai bersama tim dari Geodesi UGM sudah melakukan pemotretan dampak dan wilayah aliran lahar hujan Merapi. Data tersebut masih valid digunakan saat ini.

Totok menegaskan, konsep M3K merupakan alternatif terbaik saat ini untuk penataan kawasan sungai perkotaan. Meskipun hal itu masih dalam tataran gagasan dan konsep. (pra/yog/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005